

## **NOTA KESEPAHAMAN**

Nomor : 1 TAHUN 2023  
Nomor : 129/SK/BP/ICW/V/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang  
dalam melaksanakan Pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia,  
maka yang bertanda tangan di bawah ini:

**SARAH SADIQA**  
**Pjt. SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN**  
**BARANG/JASA PEMERINTAH**  
berkedudukan di Jakarta dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

dan

**AGUS SUNARYANTO**  
**KOORDINATOR BADAN PEKERJA INDONESIA CORRUPTION WATCH**  
berkedudukan di Jakarta dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
**BADAN PEKERJA INDONESIA CORRUPTION WATCH**

Sepakat mengadakan kerja sama secara sinergis di bidang Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi:

1. Pengembangan kajian-kajian bersama di bidang Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah;
2. Sosialisasi kegiatan dan kampanye bersama melalui media publikasi  
serta seminar, konferensi, simposium, dan/atau lokakarya;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah untuk masyarakat sipil, Aparatur Sipil Negara,  
dan pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
4. Peningkatan partisipasi publik dalam memantau dan melaporkan  
penyimpangan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Penguatan partisipasi dan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi  
dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Konsultasi, pendampingan, dan bimbingan teknis di bidang pengawasan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Penyediaan, pemanfaatan, serta pertukaran data dan informasi terkait  
dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing;
8. Pengembangan bersama sistem-sistem elektronik untuk pengelolaan  
dan pemantauan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Implementasi Standar Layanan Informasi Publik dalam sistem  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

10. *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepakatan ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Jakarta pada tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11 - 05 - 2023).

**LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH  
a.n. KEPALA,  
Plt. SEKRETARIS UTAMA,**



**SARAH SADIQA**

**INDONESIA CORRUPTION WATCH  
KOORDINATOR BADAN PEKERJA,**

**AGUS SUNARYANTO**



# OPEN GOVERNMENT WEEK 2023

## PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN DAN DISKUSI PANEL

**Bogat Widyatmoko, SE, MA**

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas

**Siti Juliantari Rachman**

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch



**Ir. Sonny Sumarsono, MBA., PMP**

Ketua DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia

**Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M.**

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

### KEYNOTE SPEAKERS

**Sarah Sadiqa, SH., M.Sc.**

Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan, LKPP

**Rita Berlis**

Ketua DPP Bidang Pengembangan Profesi, IAPI

**Wana Alamsyah**

Manager Divisi Knowledge Management, ICW



### NARASUMBER

**MODERATOR**



**Dewi Anggraeni**

**"PENINGKATAN EFISIENSI DAN PENCEGAHAN KORUPSI DALAM TRANSFORMASI PENGADAAN PUBLIK"**

**KAMIS, 11 MEI 2023  
12.45 WIB - 15.45 WIB  
LANTAI 2 BALLROOM B, GRAND HYATT HOTEL, JAKARTA**

## OGI Week 2023

1. Bertempat di Grand Hyatt 10-11 Mei 2023 Ballroom B (13x18x7m)
  2. Roundtable untuk peserta masing-masing 8 kursi
  3. Sofa di panggung 4, operator zoom 1, regis 1, booth di luar ruangan, podium untuk sambutan, meja penandatanganan MOU
  4. Agenda start 12.45 diawali makan siang
  5. Ruang makan terbatas, hanya 100 tempat duduk atas nama Bappenas, flow peserta perlu diatur
  6. Ruang jam 12.00 -13.00 (kemungkinan) belum bisa dipakai karna ganti layout, dll dll
  7. Protokol sambutan LKPP pejabat tertinggi itu terahir, karna cukup banyak yg memberi sambutan, mungkin bisa di pecah ada yg sambutan sbkm (Bappenas dan ICW) dan sesudah (IAPI dan LKPP) penandatanganan MOU
  8. Jurnalis perlu di infokan lokasi untuk doorstep/konpers pada saat pengisian daftar hadir
  9. Untuk sementara hanya menggunakan zoom webinar untuk streaming?
  10. Interpreter akan di siapkan ICW
  11. Loading barang untuk booth bisa dari pagi
  12. Apakah perlu bahan publikasi untuk peserta?
- 3:00 PM





TOR

[https://docs.google.com/document/d/1TsvqEvp1CrMTIDMK\\_wunA8FeyYzrQDm8WlguTw1zuqg/edit](https://docs.google.com/document/d/1TsvqEvp1CrMTIDMK_wunA8FeyYzrQDm8WlguTw1zuqg/edit)

Siaran Pers

<https://docs.google.com/document/d/1M4ytW5-FUTPBKYxWMITrR2zDduBNI9EKijAK67DMDC8/edit>

Layout Ballroom

